# PERATURAN DESA DEKET KULON

Nomor : 01 TAHUN 2012

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDES)

DESA DEKET KULON KECAMATAN DEKET

KABUPATEN LAMONGAN

TAHUN 2012

PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN DEKET
DESA DEKET KULON

**KECAMATAN DEKET**
**PEMERINTAH DESA DEKET KULON**

PERATURAN DESA DEKET KULON KECAMATAN DEKET KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR 01. TAHUN 2012

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DEKET KULON
TAHUN ANGGARAN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**KEPALA DESA DEKET KULON**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Deket KulonTahun Anggaran 2012 dengan Peraturan Desa.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);

PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
**KECAMATAN DEKET**
**DESA DEKET KULON**

**KECAMATAN DEKET**
**PEMERINTAH DESA DEKET KULON**

PERATURAN DESA DEKET KULON KECAMATAN DEKET KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR 01. TAHUN 2012

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DEKET KULON
TAHUN ANGGARAN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**KEPALA DESA DEKET KULON**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Deket KulonTahun Anggaran 2012 dengan Peraturan Desa.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 14/E);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 16 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 16);
15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33);
16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 58 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 58);
17. Peraturan Desa Deket Kulon Nomor 02 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa .

Memperhatikan : Berita Acara BPD tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA DEKET KULON TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA 01 TAHUN ANGGARAN 2012.

Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Deket KulonTahun Anggaran 2012 sejumlah Rp. 238.050.000,- ( Dua ratus tiga puluh delapan juta lima puluh ribu rupiah ).

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 terdiri dari :

| | |
|---|---|
| a. Pendapatan | Rp. 238.050.000,- |
| b. Belanja | |
| 1) Langsung | Rp. 82.700.000,- |
| 2) Tidak Langsung | Rp. 155.350.000,- |
| c. Pembiayaan | |
| 1) Penerimaan | Rp. ..... |
| 2) Pengeluaran | Rp. ..... |

Pasal 3

Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 4

Penjabaran mengenai teknis pelaksanaan dalam Peraturan ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa.

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Deket Kulon
Pada tanggal 26 Januari 2012

KEPALA DESA DEKET KULON

TRI MARYONO,SE

*Lampiran Peraturan Desa Deket Kulon Kec. Deket*
*Kabupaten Lamongan*
*Nomor : 01 Tahun 2012*
*Tanggal : 26 Januari 2012*
*Perihal : Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa*

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA**
**DESA DEKET KULON KECAMATAN DEKET**
**TAHUN ANGGARAN 2012**

| KODE REKENING | URAIAN | TAHUN SEBELUMNYA (Rp.) | TAHUN BERJALAN (Rp.) | KET |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | PENDAPATAN | | | |
| 1,1 | Pendapatan Asli Desa | 124.400.000 | 125.450.000 | |
| 1.1.1 | Hasil Usaha Desa | | | |
| 1.1.1.1 | BUMDES | | | |
| 1.1.1.2 | USAHA KSU/SIMPAN PINJAM DESA | | | |
| 1.1.1.3 | USAHA JASA/PELAYANAN DESA | | | |
| 1.1.1.4 | BADAN/LEMBAGA KEUANGAN LAINNYA YANG DIKELOLA DESA | | | |
| 1.1.1.5 | Dst. ..... | | | |
| | | | | |
| 1.1.2 | Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa | 94.750.000 | 92.700.000 | |
| 1.1.2.1 | TANAH KAS DESA : (*) | 94.750.000 | 92.700.000 | |
| 1.1.2.1.1 | TANAH DESA (sewa tanah/suguh dayuh/pager kikis dll) | 35.200.000 | 29.500.000 | |
| 1.1.2.1.2 | SEWA BENGKOK (Kades/Perangkat desa lainnya dll) | 59.550.000 | 63.200.000 | |
| 1.1.2.1.3 | Dst. ..... | | | |
| | | | | |
| 1.1.2.2 | PASAR DESA | | | |
| 1.1.2.3 | PASAR HEWAN | | | |
| 1.1.2.4 | TAMBATAN PERAHU | | | |
| 1.1.2.5 | BANGUNAN DESA (Ruko desa, Tempat peristirahatan dll) | | | |
| 1.1.2.6 | PELELANGAN IKAN YG DIKELOLA DESA | | | |
| 1.1.2.7 | LAIN-LAIN KEKAYAAN MILIK DESA (Asset desa) | | | |
| 1.1.2.8 | Dst. ..... | | | |
| | | | | |
| 1.1.3 | Hasil Swadaya dan Partisipasi | 27.550.000 | 29.500.000 | |
| 1.1.3.1 | SWADAYA MASYARAKAT | 27.550.000 | 29.500.000 | |
| 1.1.3.2 | PARTISIPASI KELOMPOK MASYARAKAT | | | |
| 1.1.3.3 | Dst. ..... | | | |
| | | | | |
| 1.1.4 | Hasil Gotong Royong | 0 | | |
| 1.1.4.1 | NILAI TENAGA GOTONG-ROYONG | | | |
| 1.1.4.2 | Dst..... | | | |
| | | | | |
| 1.1.5 | Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah | 2.100.000 | 3.250.000 | |
| 1.1.5.1 | JASA SURAT-MENYURAT | 2.100.000 | 3.250.000 | |
| 1.1.5.2 | PROSENTASE JASA PELAYANAN DESA | | | |
| 1.1.5.3 | JASA PUNGUT DESA (jual beli ternak, peralatan dll) | | | |
| 1.1.5.4 | Dst..... | | | |
| | | | | |
| 1,2 | Bagi Hasil Pajak : | 4.900.000 | 4.900.000 | |
| 1.2.1 | BAGI HASIL PAJAK KABUPATEN/KOTA | | | |
| 1.2.2 | BAGI HASIL PBB | 4.900.000 | 4.900.000 | |
| 1.2.3 | Dst. ..... | | | |
| | | | | |
| 1,3 | Bagi Hasil Retribusi | | | |
| 1.3.1 | BAGI HASIL RETRIBUSI (wisata, usaha desa, pasar dll) | | | |
| 1.3.2 | Dst..... | | | |
| | | | | |
| 1,4 | Bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah | 52.500.000 | 52.500.000 | |
| 1.4.1 | ADD | 41.500.000 | 41.500.000 | |
| 1.4.2 | BANSUN | 11.000.000 | 11.000.000 | |
| 1.4.3 | Dst..... | | | |
| 1,5 | Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi, Kabupaten/Kota, dan desa lainnya | 44.000.000 | 55.200.000 | |
| 1.5.1 | Bantuan Keuangan Pemerintah | | | |
| 1.5.1.1 | APBN PUSAT | | | |
| 1.5.1.2 | LEMBAGA nGO | | | |
| 1.5.1.3 | LEMBAGA PERWAKILAN LUAR NEGERI DI INDONESIA | | | |
| | | | | |
| 1.5.2 | Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi | | 1.000.000 | |
| 1.5.2.1 | APBD PROVINSI (BKD, JASMAS, RASINTEK dll) | | | |
| 1.5.2.3 | BIAYA SOSIALISASI E-KTP | | 1.000.000 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 1.5.3 | Kabupaten/Kota | 44.000.000 | 64.200.000 | |
| 1.5.3.1 | TPAPD (Kades dan Perangkat desa lainnya) | 39.600.000 | 49.800.000 | |
| 1.5.3.2 | TPBPD | 4.400.000 | 4.400.000 | |
| 1.5.3.3 | BANTUAN REHAB BALAI / KANTOR DESA | | | |
| 1.5.3.4 | ASURANSI KEPALA DESA | | | |
| 1.5.3.5 | BANTUAN PURNA BAKHTI | | | |
| 1.5.3.6 | KOMPENSASI SEKDES | | | |
| 1.5.3.7 | GAJI SEKRETARIS DESA | 0 | 0 | |
| | | | | |
| 1.5.4 | Bantuan Keuangan Desa lainnya : | | | |
| 1.5.4.1 | TUNJANGAN KINERJA SEKDES | | | |
| 1.5.4.2 | Dst..... | | | |
| | | | | |
| 1,6 | Hibah | 60.000.000 | 0 | |
| 1.6.1 | Hibah dari pemerintah | | | |
| 1.6.1.1 | BANTUAN JALAN POROS | 50.000.000 | | |
| 1.6.1.2 | KOPERASI WANITA | 0 | | |
| | | | | |
| 1.6.2 | Hibah dari pemerintah propinsi | | | |
| 1.6.2.1 | | | | |
| 1.6.2.2 | Dst.... ..... | | | |
| | | | | |
| 1.6.3 | Hibah dari pemerintah Kabupaten/Kota | | | |
| 1.6.3.1 | PERAHU TEMPEL | | | |
| 1.6.3.2 | Dst..... | | | |
| | | | | |
| 1.6.4 | Hibah dari badan/organisasi/swasta | | | |
| 1.6.4.1 | | | | |
| 1.6.4.2 | | | | |
| | | | | |
| 1.6.5 | Hibah dari kelompok masyarakat perorangan | | | |
| 1.6.5.1 | KELOMPOK MASYARAKAT PERANTAUAN | | | |
| | | | | |
| 1,7 | Sumbangan Pihak Ketiga | | | |
| 1.7.1 | LOWONGAN PENGISIAN KADES/PERANGKAT DESA LAINNYA | | | |
| 1.7.2 | Dst..... | | | |
| | | | | |
| | JUMLAH PENDAPATAN (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6+1.7) | 275.800.000 | 238.050.000 | |
| | | | | |
| 2 | BELANJA | | | |
| 2,1 | Belanja Langsung (2.1.1+2.1.2+2.1.3) | 77.800.000 | 82.700.000 | |
| 2.1.1 | Belanja Pegawai/Honorarium | 14.200.000 | 10.200.000 | |
| 2.1.1.1 | HONORARIUM PENGELOLA ADD | 1.200.000 | 1.200.000 | |
| 2.1.1.2 | HONORARIUM PETUGAS LINMAS DESA | 500.000 | 500.000 | |
| 2.1.1.3 | HONORARIUM KETUA BPD DAN ANGGOTANYA | 1.650.000 | 1.650.000 | |
| 2.1.1.4 | HONORARIUM KETUA RT/RW | 2.800.000 | 2.800.000 | |
| 2.1.1.5 | HONORARIUM PKBD/SUB PKBD/KADER GIZI | 550.000 | 550.000 | |
| 2.1.1.6 | HONORARIUM PENGURUS LPM | 900.000 | 900.000 | |
| 2.1.1.7 | HONORARIUM PENGURUS SINOMAN | 1.500.000 | 1.500.000 | |
| 2.1.1.8 | HONORARIUM STAP TU | 4.000.000 | 0 | |
| 2.1.1.9 | HONORARIUM POSYANDU | 600.000 | 600.000 | |
| 2,1,1,10 | HONORARIUM PENGURUS PKK | 500.000 | 500.000 | |
| | | | | |
| 2.1.2 | Belanja Barang/Jasa | 14.700.000 | 23.200.000 | |
| 2.1.2.1 | Belanja Perjalanan Dinas | 7.350.000 | 11.600.000 | |
| 2.1.2.1.1 | KEPALA DESA/PERANGKAT DESA LAINNYA | 500.000 | 500.000 | |
| 2.1.2.1.2 | PENGURUS RT/RW | 200.000 | 200.000 | |
| 2.1.2.1.3 | PELAKSANA BANDES | 800.000 | 800.000 | |
| 2.1.2.1.4 | KUNJUNGAN TAMU | 200.000 | 200.000 | |
| 2.1.2.1.5 | BIAYA PEMILU | 0 | 0 | |
| 2.1.2.1.6 | INTENSIF PBB | 4.900.000 | 4.900.000 | |
| 2.1.2.1.7 | PENDIDIKAN PELATIHAN | 750.000 | 1.500.000 | |
| 2.1.2.1.8 | PEMILIHAN BPD | 0 | 1.000.000 | |
| 2.1.2.1.9 | SERTIFIKAT TANAH KAS DESA | 0 | 2.600.000 | |
| | | | | |
| 2.1.2.2 | Belanja Bahan/Material | 54.300.000 | 60.950.000 | |
| 2.1.2.2.1 | BELANJA ATK | 2.600.000 | 3.250.000 | |
| 2.1.2.2.2 | PERALATAN/PERLENGKAPAN KANTOR | 6.550.000 | 6.550.000 | |
| 2.1.2.2.3 | PEMELIHARAAN KANTOR DAN BALAI DESA | 2.000.000 | 2.000.000 | |
| 2.1.2.2.4 | PEMBANGUNAN SARANA DESA | 3.600.000 | 3.600.000 | |
| 2.1.2.2.5 | PEMBUATAN TEMPAT PEMBUANGAN SAMPAH | 0 | 4.000.000 | |
| 2.1.2.2.6 | PEMBAYARAN PBB BONDO DESA | 600.000 | 600.000 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2.1.2.7 | BELANJA BAHAN/MATERIAL ADD | 29.050.000 | 29.050.000 | |
| 2.1.2.8 | BELANJA BAHAN/MATERIAL BANSUN | 11.000.000 | 11.000.000 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

3

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 2.1.3 | **Belanja Modal** | **1.950.000** | **1.950.000** | |
| 2.1.3.1 | BELANJA MODAL TANAH | | | |
| 2.1.3.2 | BELANJA MODAL JARINGAN (LISTRIK/AIR) | 1.950.000 | 1.950.000 | |
| | | | | |
| 2,2 | **Belanja Tidak Langsung (2.2.1+2.2.2+2.2.3+2.2.4+2.2.5)** | **198.000.000** | **186.350.000** | |
| 2.2.1 | **Belanja Pegawai/penghasilan tetap** | **103.550.000** | **117.400.000** | |
| 2.2.1.1 | Belanja Pegawai/penghasilan tetap Kades | 31.000.000 | 32.600.000 | |
| 2.2.1.1.1 | PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA | 25.000.000 | 25.000.000 | |
| 2.2.1.1.2 | TPAPD KEPALA DESA | 6.000.000 | 7.600.000 | |
| | | | | |
| 2.2.1.2 | Belanja Pegawai/penghasilan tetap Sekdes | | 11.000.000 | |
| 2.2.1.2.1 | PENGHASILAN TETAP SEKDES NON PNS | | 5.000.000 | |
| 2.2.1.2.2 | TPAPD SEKDES NON PNS | | 6.000.000 | |
| | | | | |
| 2.2.1.3 | Belanja Pegawai/penghasilan tetap Kepala Dusun | 22.600.000 | 25.000.000 | |
| 2.2.1.3.1 | PENGHASILAN TETAP KEPALA DUSUN | 13.000.000 | 13.000.000 | |
| 2.2.1.3.2 | TPAPD KEPALA DUSUN | 9.600.000 | 12.000.000 | |
| | | | | |
| 2.2.1.4 | Belanja Pegawai/penghasilan tetap Kasi/Kaur | 45.550.000 | 44.200.000 | |
| 2.2.1.4.1 | PENGHASILAN TETAP KASI/KAUR | 21.550.000 | 20.200.000 | |
| 2.2.1.4.2 | TPAPD KASI/KAUR | 24.000.000 | 24.000.000 | |
| | | | | |
| 2.2.1.5 | Belanja pegawai/penghasilan tetap BPD | 4.400.000 | 4.400.000 | |
| 2.2.1.5.1 | REPRESENTATIF BPD | 4.400.000 | 4.400.000 | |
| 2.2.1.5.2 | TUNJANGAN BPD | | | |
| | | | | |
| 2.2.2 | **Belanja Hibah** | **50.000.000** | **0** | |
| 2.2.2.1 | KOPERASI WANIA | | | |
| 2.2.2.2 | JALAN POROS | 50.000.000 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 2.2.3 | **Belanja Bantuan Sosial** | **22.760.000** | **22.760.000** | |
| 2.2.3.1 | KEGIATAN PHBN/PHBI | 1.000.000 | 1.000.000 | |
| 2.2.3.2 | KEGIATAN BERSIH DESA | 10.000.000 | 10.000.000 | |
| 2.2.3.3 | PERLOMBAAN DESA | 350.000 | 350.000 | |
| 2.2.3.4 | SANTUNAN KEMATIAN | 5.000.000 | 5.000.000 | |
| 2.2.3.5 | PEMELIHARAAN ALAT ALAT SINOMAN | 1.500.000 | 1.500.000 | |
| 2.2.3.6 | THR | 3.000.000 | 3.000.000 | |
| 2.2.3.7 | BASIS KABUPATEN | 1.750.000 | 1.750.000 | |
| 2.2.3.8 | PENYANDANG CACAT | 150.000 | 150.000 | |
| | | | | |
| 2.2.4 | **Belanja Bantuan Keuangan** | **9.000.000** | **9.000.000** | |
| 2.2.4.1 | OPERASIONAL BPD | 2.500.000 | 2.500.000 | |
| 2.2.4.2 | OPERASIONAL LPM | 2.000.000 | 2.000.000 | |
| 2.2.4.3 | OPERASIONAL PKK | 3.000.000 | 3.000.000 | |
| 2.2.4.4 | OPERASIONAL KARANGTARUNA | 1.000.000 | 1.000.000 | |
| 2.2.4.5 | OPERASIONAL PJ PK/PJAK | 0 | 0 | |
| 2.2.4.6 | OPERASIONAL POS YANDU | 500.000 | 500.000 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 2.2.5 | **Belanja tak terduga** | **12.700.000** | **6.200.000** | |
| 2.2.5.1 | KEADAAN DARURAT | 12.450.000 | 5.950.000 | |
| 2.2.5.2 | BENCANA ALAM | 250.000 | 250.000 | |
| | | | | |
| | **JUMLAH BIAYA (2.1+2.2)** | **276.800.000** | **230.060.000** | |
| | | | | |
| 3,1 | **Penerimaan Pembiayaan** | | | |
| 3.1.1 | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Tahun sebelumnya | | | |
| 3.1.2 | Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan | | | |
| 3.1.3 | Penerimaan Pinjaman | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 3,2 | Pengeluaran Pembiayaan | | | |
| 3.2.1 | Pembentukan Dana Cadangan | | | |
| 3.2.2 | Penyertaan Modal Desa | | | |
| 3.2.3 | Pembayaran Hutang | | | |
| | JUMLAH PEMBIAYAAN (3.1- 3.2) | | | |

Ditetapkan di Dekat Kulon
Pada Tanggal 26 Januari 2012

Kepala Desa Dekat Kulon

TRI MARYONO SE

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD )**
**DESA DEKET KULON KECAMATAN DEKET**
**KABUPATEN LAMONGAN**

---

**KEPUTUSAN BADAN PERWAKILAN DESA DEKET KULON**
**NOMOR : 01 TAHUN 2012**
**TENTANG**
**PERSETUJUAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA**
**DEKET KULON TAHUN ANGGARAN 2012**

**BADAN PERWAKILAN DESA DEKET KULON**

Menimbang : Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Deket Kulon Kecamatan Deket, Kabupaten Lamopngan Tahun Anggaran 2012 perlu ditetapkan dengan Peraturan Desa sesuai dengan pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000.

Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
2. Undang-undang nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah ;
3. Keputusan Dalam Negeri nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan mengenai Desa ;
4. Peraturan Daerah Kabupen Lamongan Nomor 34 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa ;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 39 Tahun 2000 tentang Sumber-sumber Pendapatan Desa ;
7. Peraturan Daerah kabupaten Lamongan nomor 40 Tahun 2000 Tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa ;
8. Keputusan Bupati Lamongan nomor 59 Tahun 2001 tentang Pedoman Pengelolaan Sumber-sumber Pendapatan Desa dan Kekayaan Desa ;
9. Keputusan Bupati Lamongan Nomor 60 Nomor 2001 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa ;
10. Keputusan Bupati Lamongan nomor 61 Tahun 2001 tentang Kedudukan Keuangan Badan Perwakilan Desa ;
11. Keputusan Bupati Lamongan nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ;
12. Peraturan Desa Deket Kulon Nomor 4 Tahun 2002 tentang Sumber-sumber Pendapatan Desa dan Kekayaan Desa ;
13. Peraturan Desa Deket Kulon nomor 5 Tahun 2002 Tentang Kedudukan Keuangan Badan Perwakilan Desa ;
14. Peraturan Desa Deket Kulon nomor 6 Tahun 2002 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa ;
15. Peraturan Tata Tertib BPD Deket Kulon

Memperhatikan : Pandangan umum, pendapat,tanggapan dan saran dari para Anggota Badan Perwakilan Desa Deket Kulon mengenai Pos dan Pasal-pasal dari Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Deket Kulon Tahun Anggaran 2012 serta penjelasan Kepala Desa pada rapat-rapat BPD pada tanggal 03 Pebruari 2012 .

**M E M U T U S K A N**

MENETAPKAN :

Pertama : Menyetujui dan mengesahkan Rancangan Peraturan Desa Deket Kulon tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2012 menjadi Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Deket Kulon tahun Anggaran 2012 .

Kedua : Anggaran Pendapatan dan Belanja Dsa Deket Kulon Tahun anggaran 2012 , sejumlah Rp. 238.050.000,- Terdiri atas :

| | |
|---|---|
| a. Anggaran Pendapatan sebesar | Rp. 238.050.000,- |
| b. Anggaran Belarja meliputi : | |
| - Belanja Rutin sebesar | Rp. 82.700.000,- |
| - Belanja Pembangunan | Rp. 155.350.000,- |
| Jumlah | Rp. 238.050.000,- |

Ketiga : Ringkasan dan Rincian lebih lanjut Diktum Kedua sebagaimana lampiran Peraturan desa dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan peraturan Desa ini.

Keempat : Menugaskan Kepala Desa untuk menindaklanjuti dan melaksanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2012 ini dengan sebaik-baiknya dan melaporkan hasil pelaksanaanya kepada Badan Perwakilan Desa sesuai mekanisme yang telah diatur. Anggaran Pendapatan dan Belanja ini berlaku sejak awal Tahun anggaran.

Dietatapkan di Deket Kulon
Pada Tanggal 03 Pebruari 2012

BADAN PERWAKILAN DESA DEKET KULON

**SENIN HARIYANTO**

**RISALAH RAPAT PARIPURNA BADAN PERWAKILAN DESA DEKET KULON**
**TANGGAL 03 PEBRUARI 2012**

1. JENIS DAN SIFAT RAPAT :
   Rapat Paripurna BPD dan terbuka untuk umum.
2. HARI DAN TANGGAL RAPAT :
   Hari Jum'at tanggal 03 Pebruari 2012
3. TEMPAT RAPAT :
   Di Balai Desa Deket Kulon, Kecamatan Deket.
4. ACARA RAPAT :
   Rapat Paripurna BPD membahas Rancangan Angaran Pendapatan dan Belanja Desa Deket Kulon Tahun Anggaran 2012.
5. WAKTU PEMBUKAAN DAN PENUTUPAN RAPAT :
   Rapat dibuka pukul 20.00 Wib. Dan ditutup pada pukul 22.00 Wib.
6. PIMPINAN RAPAT :
   Rapat dipim[in oleh Ketua BPD Deket Kulon
7. JUMLAH DAN NAMA ANGOTA YANG HADIR :
   Nama Anggota BPD yang hadir sebagaimana terlampir
8. HASIL KESIMPULAN RAPAT :
   1. Seperti halnya pada rapat BPD sebelumnya yang mencermati Pos Anggaran terutama Anggaran Pendapatan, maka pada Rapat Paripurna BPD tanggal 03 Pebruari 2012 juga menyoroti pemasukan hasil swadaya masyarakat dari sumber dana Pembangunan dll, Anggota BPD mengharapkan agar :
      a. Semua Kepala Keluarga dapat menyetorkan sepenuhnya Dana Pembangunan Desa kepada desa sehingga mencapai Rp. 6.500.000,-
      b. Surat Ijin Keramaian dipungut sesuai klasifikasi keramaian, sehingga mencapai Rp. 460.000,-
      c. Demikian juga untuk Pos Pendapatan Lainnya diharap ada kenaikan.

   2. Selanjutnya menugaskan kepada Kepala Desa untuk melaksanakan APBD TH. 2012 ini dengan sebaik-baiknya, dan menyampaikan perkembangannya secara bertahap sesuai mekanisme.

Demikian Risalah ini dibuat untuk menjadikan periksa.

Deket Kulon, 03 Pebruari 2012

BADAN PERWAKILAN DESA DEKET KULON

**SENIN HARIYANTO**

Daftar hadir : Rapat / Musyawarah
Badan Permusyawaratan Desa Deket Kulon
Guna membahas Persetujuan Peraturan
Desa Deket Kulon Nomor : [illegible] Tahun 20[illegible]
Hari : [illegible]
Tanggal : [illegible]

| No | Nama | Jabatan | Tandatangan | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SENIN HARIYANTO | Ketua | | |
| 2 | Ir.DENIE SUBAGIYANA | Wkl.Ket | | |
| 3 | ABD.WAHID SH. | Sekretaris | | |
| 4 | Drs.DAHLAN AM. | Anggota | | |
| 5 | Drs.M ZAHID | Anggota | | |
| 6 | ALFIAN ZULIANTO ST. | Anggota | | |
| 7 | ABD.RO'UF Spd. | Anggota | | |
| 8 | SUYITNO | Anggota | | |
| 9 | NUR HAMZA | Anggota | | |
| 10 | WIJI | Anggota | | |
| 11 | MUZAIDI | Anggota | | |

Deket kulon,

Kepala Desa Deket

***TRI MARIYONO SE.***